

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Branta Pesisir merupakan salah satu desa di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dengan jumlah penduduk cukup padat dan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jumlah penduduk Desa Branta Pesisir sekitar 6.024 jiwa. Sebanyak 50 persen dari total populasi penduduk tersebut sehari-hari bekerja sebagai nelayan sementara 50 persen lainnya bekerja sebagai supir angkot, pedagang, perawat dan polisi (BPS Pamekasan, 2018). Desa dengan luas 22,8 hektare itu secara administrasi dibagi menjadi tujuh dusun. Yakni, Dusun Bandaran, Dusun Gilin, Dusun Lunas, Dusun Mayang, Dusun Tengah Satu dan Dusun Tengah Dua. Banyak potensi ekonomi yang ada di desa yang berada di wilayah pantai selatan Kabupaten Pamekasan itu. Di antaranya, potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya, tambak udang, tambak garam dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis produk perikanan.

Keterampilan masyarakat Desa Branta Pesisir dalam mengolah sumber daya yang ada sangat baik. Terbukti, banyak tumbuh usaha rumahan (*home industry*) yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat seperti usaha pembuatan abon ikan, krupuk ikan, warung rujak kelang, terasi, petis dan produk lainnya. Meski demikian, kondisi perekonomian nelayan buruh di desa tersebut tetap kurang baik. Kemelut kemiskinan menghantui masyarakat sehingga mereka tidak memiliki kemandirian dari sisi ekonomi.

Profesi umumnya masyarakat Desa Branta Pesisir sebagai nelayan yang sudah berlangsung puluhan tahun nampaknya tidak cukup untuk mengangkat kesejahteraan mereka. Hubungan antara nelayan buruh dengan pemilik kapal yang telah diatur dalam suatu kontrak kerja sedemikian rupa, terbukti tidak memberikan ruang yang baik bagi nelayan buruh untuk memperbaiki taraf hidupnya. Pemilik kapal sebagai principal seringkali banyak mendapatkan keuntungan ekonomi dalam system kontraktual yang ada dibandingkan dengan nelayan buruh. Melalui system kerjasama seperti inilah justru telah terbentuk suatu mekanisme “eksploitasi” dari pemilik kapal terhadap nelayan buruh yang posisinya sangat lemah. Banyak cara yang dikreasikan oleh pemilik kapal untuk menjebak nelayan buruh sehingga hal itu akan melemahkan posisi tawar dari nelayan buruh itu sendiri. Hampir setiap

kebutuhan keuangan yang dialami nelayan buruh dipenuhi oleh pemilik kapal sehingga ada keterikatan yang begitu kuat. Keterikatan tersebut memicu adanya hubungan agensi yang kurang adil antar keduanya. Bahkan, cenderung membatasi ruang gerak nelayan buruh. Misalnya, nelayan buruh harus menjual hasil tangkapan ikan kepada pemilik kapal yang sekaligus bertindak sebagai pengepul. Kemudian, pada periode tertentu yang disepakati, nelayan buruh tidak boleh pindah bekerja ke tempat lain meskipun kontrak yang dijalankan lebih menguntungkan pemilik kapal dari pada nelayan buruh. Fenomena inilah yang seringkali menghasilkan sebuah ketimpangan ekonomi dan ada kecenderungan untuk melanggengkan status quo si pemilik kapal sebagai kelompok masyarakat kelas atas sementara nelayan buruh harus setia “menikmati” statusnya sebagai warga masyarakat kelas dua yang miskin dan termarginalkan.

Kondisi ekonomi yang tidak kurang berpihak menyebabkan nelayan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan juragan kapal sebagai principal. Tindakan tersebut berupa kecurangan seperti menjual ikan hasil tangkapan kepada nelayan lain di tengah laut tanpa sepengetahuan pemilik kapal sehingga hasil penjualan tersebut hanya dinikmati ABK selaku agen tanpa disetor kepada pemilik kapal. Kemudian, adanya penjualan bahan bakar minyak (BBM) di tengah laut sehingga biaya operasional yang harus dikeluarkan pemilik kapal menjadi semakin tinggi. Sementara, hasil tangkapan ikan sedikit karena area penangkapan ikan terbatas akibat solar kapal berkurang. Tindakan kecurangan tersebut dipicu kondisi ekonomi yang tidak berpihak kepada ABK sementara kebijakan dari pemilik kapal selaku principal juga tidak begitu menguntungkan dan cenderung lebih menguntungkan pemilik kapal dibanding ABK.

Melihat kondisi kemiskinan di kampung nelayan umumnya di Indonesia, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian KKP telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi akar masalahnya. Salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan sarana produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi nelayan. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan nelayan, akan tetapi banyak program-program seperti ini malah berakhir memilukan karena tidak tepat sasaran. Masyarakat miskin yang menjadi target sasaran penerima manfaat program, tetapi karena adanya ketentuan bahwa penerima bantuan adalah lembaga yang memiliki

bukti-bukti legalitas maka praktis bantuan itu tidak pernah sampai kepada nelayan buruh yang selama ini selalu berkutat dengan kondisinya yang marjinal dan miskin itu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan itu pula, peneliti merasa perlu untuk melihat dua hal ; (1) sejauhmana hubungan agensi antara nelayan buruh dengan pemilik kapal telah mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan (2) sejauhmana efektivitas program bantuan pemerintah telah mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan buruh?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana masalah hubungan agensi yang terjadi antara nelayan buruh dengan pemilik kapal?
2. Sejauh mana efektivitas bantuan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan buruh ?

1.3 Tujuan

1. Menganalisa masalah agensi yang timbul dari hubungan antara nelayan buruh dengan pemilik kapal.
2. Menganalisa efektivitas bantuan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan buruh.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat baik terhadap nelayan, pemerintah dan masyarakat secara umum. Adapun periciannya sebagai berikut :

1. Manfaat bagi nelayan agar dapat memperbaiki pendapatan melalui berbagai skema kerja sama ekonomi yang ada.
2. Manfaat bagi pemerintah dapat menyusun skema tata kelola bantuan program yang lebih adil bagi seluruh warga masyarakat.
3. Manfaat bagi akademisi diharapkan dapat memperkaya khasanah bagi pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan dengan teori keagenan.